

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Biografi Nurcholish Madjid

1. Riwayat Intelektual Nurcholish Madjid

Nama pertama yang diberikan pasangan KH. Abdul Madjid (ayah Nurcholish Madjid) dan Hj. Fathona (ibu Nurcholish Madjid) kepada putra sulungnya adalah Abdul Malik, yang berarti "Hamba Allah" (Malik merupakan nama sebutan untuk Allah dalam deretan ketiga Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah). Perubahan nama menjadi Nurcholish Madjid terjadi pada usia 6 tahun karena Abdul Malik kecil sering sakit-sakitan. Dalam tradisi Jawa, anak yang sering menderita sakit dianggap "kabotan jeneng" (keberatan nama).⁵⁶

Nurcholish Madjid lahir di Jombang pada Jumat Legi, tanggal 17 Maret 1939 Jawa Timur. Nurcholish Madjid lahir di lingkungan keluarga pesantren. Pemberian nama Nurcholish Madjid sendiri tidak terlalu jelas asal-muasalnya, kecuali bahwa nama itu dari bahasa arab, *nur* berarti "cahaya" *cholish* berarti "murni" atau "bersih". Sementara itu nama belakangnya Madjid, diambil dari nama belakang sang ayah. Ayah nya KH. Abdul Madjid adalah santri dari tokoh pendiri NU (Nahdatul Ulama), Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari di Pesantren Tebu Ireng, Jombang,⁵⁷ dan ayahnya juga dikenal sebagai pendukung Masyumi.

⁵⁶ Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid*, Jakarta: Kompas 2010, Hal 1

⁵⁷ *ibid*

Oleh karenanya warna keIslaman dalam kehidupannya cukup menonjol. Tradisi pesantren inilah yang banyak mempengaruhi kepribadiannya.

Belum genap berusia dua tahun Nurcholish Madjid memiliki adik perempuan yang bernama Radliyah atau Mukhlisah. Setelah itu menyusul adik perempuannya yang lain bernama Qoni'ah, dan adiknya yang bernama Qonia'ah ini meninggal pada usia 15 tahun akibat penyakit malaria tropika, kemudian berturut-turut lahir Saifullah Madjid dan Muhammad Adnan. Seperti halnya Nurcholish, kedua adik laki-laknya ini juga disekolahkan di pesantren Gontor. Hanya saja, berbeda dengan Nurcholish yang menapaki jalur keilmuan, atau Mukhlisah yang menjadi guru, Saifullah Madjid dan Muhammad Adnan memilih jalur bisnis setelah lulus kuliah.⁵⁸

Selain menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Nurcholish juga menempuh pendidikan di Madrasah al-Wathaniyah (madrasah yang didirikan oleh ayahnya). Nurcholish mengenyam pendidikan rangkap, pagi hari di SR dan sore hari ia belajar di Madrasah al-Wathaniyah. Karena orang tua Nurcholish madjid juga sangat mementingkan sekolah yang bersifat ilmu pengetahuan umum. Walaupun pamannya pernah melarang Nurcholish Madjid untuk berhenti bersekolah di SR, karena sekolah itu hampir semua guru-guru pengajarnya beragama Kristen. Namun, itu tidak memberikan solusi. Nurcholish juga tidak keberatan ketika harus sekolah pagi dan sore hari. Hal ini terlihat dari nilai-nilainya yang rata-rata baik, ia mampu menguasai ilmu-ilmu hitung atau aljabar

⁵⁸ ibid

yang selalu mendapat nilai tinggi ketika di sekolah SR dahulu, dan juga mampu dengan mudah menguasai pelajaran bahasa arab ketika di madrasah.

Tamatnya dari SR pada tahun 1953, Nurcholish dimasukkan oleh ayahnya ke Pesantren Darul Ulum, yang lebih dikenal dengan nama Pesantren Rejoso, karena terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan.⁵⁹ Ketika ia masuk ke Pesantren Rejoso atau yang disebut Darul Ulum. Ia diterima di kelas enam tingkat Ibtidaiyah kemudian melompat ke kelas lima, karena ia sudah menguasai pelajaran semenjak duduk di bangku madrasah milik ayahnya, al-Wathaniyah. Sumber tradisi Pesantren Rejoso juga berpusat di masjid. Waktu-waktu shalat merupakan saat di mana para santri bertatap muka secara akrab dengan para kiai. Santri diwajibkan shalat lima waktu di masjid. Para kiai bergiliran menjadi imam, dan setelah itu menyampaikan *taushiyah* (nasihat agama) sesuai bidang keahlian.⁶⁰

Kemudian pada tahun 1954, Nurcholish melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu Tsanawiyah di Pesantren yang sama (pesantren rejoso). Nurcholish juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah menjadi juara satu lomba pidato bahasa Indonesia saat duduk di bangku kelas satu Tsanawiyah.⁶¹ Suasana Pemilu menjelang tahun 1955 sangat menanas karena keluarga dari Nurcholish Madjid merupakan pendukung partai Masyumi sehingga sindiran-sindiran itu membuat Nurcholish tidak nyaman berada di Pesantren Rejoso tersebut. Hingga akhirnya ia pulang kampung dan menceritakan kejadian

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

itu ke ayahnya. Ayahnya menanggapi dengan serius apa yang dialami oleh anaknya Nurcholish Madjid, sehingga ia memutuskan untuk menarik anaknya dari Pesantren Rejoso. Ketika keputusan itu di setujui oleh ibu Nurcholish Madjid. Tampaknya orang tua Nurcholish Madjid sangat memperhatikan pendidikan agama anaknya, sehingga mereka berharap besar terhadap Nurcholish agar kelak kiranya bisa menjadi orang yang mumpuni dalam bidang agama. Hal ini terbukti, dengan tekadnya memindahkan Nurcholish Madjid ke pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

Keputusan KH. Abdul Madjid itu membuat heran banyak orang di kampungnya, sebab dimata mereka (dan di mata kaum Nahdhliyin Jombang pada umumnya) saat itu pesantren Gontor memiliki citra "setengah kafir". Setidaknya, ia dianggap bukan pesantren NU, melainkan pesantren Masyumi. Para guru dan siswanya datang dari berbagai latar belakang kultur keagamaan. Bahkan para pendirinyapun (KH. Ahmad Sahal, KH. Imam Zarkasyi, dan KH. Zainuddin Fanani) bukan orang-orang Masyumi.⁶²

Di pesantren Gontor itulah Nurcholish mulai berkenalan dan mempelajari ilmu keislaman dengan mendalam. Sebagaimana diketahui Gontor merupakan pesantren elit yang menjadi barometer lembaga pendidikan Islam secara nasional. Disana banyak diperkenalkan sistem dan metode pengajaran yang variatif dan dinamis serta kajian keilmuannya yang lebih komprehensif. Selain itu pondok Gontor adalah pondok pesantren dengan kecendrungan modernis, dalam kategori budaya politik. Nurcholish sendiri membentuk pandangan-pandangannya dari

⁶² Ibid

kitab yang mulai dipelajarinya di kelas lima itu. Ia juga sangat menyukai pelajaran *Mahfudzat* (ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang mengandung kearifan), *muthala'ah* (cerita-cerita dalam bahasa Arab yang mengandung pelajaran hidup), *al-Dinayah* (agama-agama), dan *Mantiq* (logika).⁶³

Tradisi pesantren Gontor dibentuk oleh apa yang disebut Panca Jiwa Pondok, yaitu : keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas. Kelimanya menjadi sendi kehidupan para santri. Selain itu, pondok juga memiliki moto yang menjadi falsafah pendidikan dan pengajarannya, yaitu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berfikiran bebas. Keempat unsur itu saling terkait satu sama lain. Unsur yang pertama menjadi dasar bagi unsur-unsur lainnya. Karena itu, misalnya, pengetahuan luas harus selalu dikaitkan dengan budi yang tinggi, dengan begitu para santri akan mengerti bahwa ilmu yang mereka miliki harus dimanfaatkan untuk tujuan kemaslahatan. Begitu juga motto “berfikiran bebas”, harus didahului oleh pengetahuan yang luas, sehingga kebebasan berfikir itu benar-benar mencerminkan kematangan dan tidak menjurus ke arah pemujaan pada akal fikiran.⁶⁴

Semasa di Gontor, Nurcholish juga aktif di organisasi sebagai anggota PII (Pelajar Islam Indonesia), cabang Gontor. Aktivitasnya di PII tidak terlalu menyita waktu sehingga ia mampu menyelesaikan studinya dalam waktu lima tahun, yang mana seharusnya enam tahun. Ketika ia dikelas satu, ia di izinkan untuk naik di kelas tiga langsung, karena berhasil menguasai ilmu pelajaran di

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

kelas dua. Satu tahunnya lagi Nurcholish mengabdikan untuk mengajar di Gontor, ia dipercayakan mengajar ilmu *balaghah* yaitu ilmu yang mengajarkan tentang keindahan dan ketepatan berbahasa Arab, Nurcholish juga sudah biasa menggantikan guru yang berhalangan hadir ketika waktu ia masih belajar pelajaran ini. Sehingga ia dipercaya dan mampu untuk memegang pelajaran *balaghah*.

Pembeda dari pondok-pondok tradisional adalah kitab-kitab kuning yang dikaji bersifat majemuk hal ini menjadi pembeda dari pesantren-pesantren tradisional, kitab kuning tentu saja yang dikaji. Jadi ada tradisi untuk kaji banding dan dampaknya antara lain peluang luas munculnya sikap dan cara bersikap ijtihad, yang bersifat sintesis, yang menyiratkan bahwa pendapat masa lampau ditempatkan secara non mutlak. Sebut saja dari tesis menuju antithesis dan kemudian menghasilkan sintesis.⁶⁵ Dari aspek ini, tampaknya output dari Gontor dapat dijamin kualitasnya Nurcholis Madjid termasuk salah satu yang mendapatkan legitimasi lulusan dari sana, sebagaimana kata Dawam Raharjo: "... *... tokoh ini adalah didikan pondok modern Gontor, yang disamping mengajarkan ilmu keislaman juga mengandalkan pengajaran bahasa, yaitu bahasa arab dan bahasa inggris.*"

Tamat dari Gontor pada tahun 1960, Nurcholish berencana melanjutkan kuliah ke Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Muhammadiyah, di Solo. Tetapi, rencana itu urung di wujudkan karena untuk melanjutkan kuliah ke sana, syaratnya harus punya ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara lulusan

⁶⁵Muhammad Hari Z, *Islam dan Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada 2004. Hal 96

Gontor tidak memiliki ijazah sehingga ia mengadu ke sang Kiai Zarkasyi, dan sang Kiai mencoba membesarkan dan menjanjikan bahwa Nurcholish Madjid akan melanjutkan pendidikan di Mesir. Hingga berita itu tersebar di kampung halamannya Nurcholish akan berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan, dan nyatanya ia tidak jadi melanjutkan pendidikan di Mesir.

Nurcholish Madjid akhirnya memutuskan untuk kuliah di IAIN Jakarta. Ini juga atas saran dari Kiai Zarkasyi. Maka dengan restu dari sang Kiai, berangkatlah Nurcholish ke Jakarta.⁶⁶ Pada awal tahun 1961, Nurcholish masuk ke Fakultas Adab (Sastra Arab) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Walaupun perjuangannya untuk masuk di IAIN tidak mudah di karenakan Nurcholish tidak mempunyai ijazah. Namun ia di bantu oleh koneksi alumni Gontor, sehingga Nurcholish bisa menempuh pendidikan strata satu di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama kuliah Nurcholish tidak mempunyai rumah, apalagi saudara sehingga ia harus menumpang di kost temannya sesama alumni Gontor. Ia juga pernah tinggal di asrama Masjid Agung al-Azhar (masjid Buya Hamka) pada tahun 1969 di Jakarta. Ketika itu temannya yang bernama Zaidi Malik, yang merupakan jebolan Gontor. Sehingga Nurcholish Madjid bisa berkenalan dengan Buya Hamka, bahkan pernah menggantikan Buya Hamka memberikan ceramah terutama setelah shalat subuh.

Awal mula nama Nurcholish Madjid menjadi panggilan yang sangat populer "Cak Nur", tidak terlepas dari sejarah lampau. Kelahiran Jawa Timur Jombang yang lebih dikenal dialek Surabaya yang lebih egaliter. Dimana

⁶⁶ Ahmad Gaus AF, *op.cit.*, Hal 24

penyebutan “Mas” untuk orang yang lebih tua (Jawa), dalam dialek Surabaya diganti “Cak” sehingga lebih mengesankan kesetaraan. Karena keluarga Nurcholish juga hidup dalam kultur Surabayaan. Ayahnya senang berdialog dengan anak-anaknya, sehingga terkesan santai dan nyaman. Adik-adiknya Nurchalish Madjid juga senang memanggil “Cak” dibanding panggilan “Mas”. Sehingga nama itu melekat dan populer hingga sekarang.

Pada tahun 1965, Nurcholish Madjid meraih gelar sarjana muda (BA) dari Fakultas Adab (Sastra Arab) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tiga tahun kemudian (1968), ia menuntaskan studi strata satu (S1) dengan menyanggah gelar doktorandus di bidang Sastra Arab di lembaga yang sama. Masa kemahasiswaannya banyak dihabiskan dengan diisi kegiatan-kegiatan. Berawal dari itulah potensi keintelektualan Nurcholish Madjid mulai teruji.

Pada tahun 1968 Nurcholish Madjid akan menunaikan tugas hidupnya yang lain, yaitu “menikah” karena saat itu ia genap berusia 30 tahun. Usia-usia yang cukup produktif untuk membina hidup berumah tangga. Saat itu dia mencoba menghubungi gurunya ketika di Gontor (Abdullah Mahmud), untuk di carikan teman hidup. Dimana dua tahun sebelumnya sudah di janjikan untuk segera melakukan proses lamaran, karena kesibukan Nurcholish Madjid sehingga ia baru ada keinginan untuk segera menikah.

Hingga akhirnya Nurcholish Madjid menikahi Qomariyah (anak H.Kasim seorang aktivis pergerakan Syarikat Islam dan berprofesi sebagai pengusaha

bioskop di Madiun). Pada tanggal 30 Agustus 1969, ia menuju pelaminan diiringi suatu pesta di gedung bioskop milik H. Kasim. Qomarijah atau yang akrab di panggil Omi pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (sekarang Universitas Sebelas Maret) di Surakarta. H. Kasim juga merupakan donatur PII, karena Nurcholish juga sangat kenal dengan beliau ketika menjadi aktivis PII cabang Gontor pada waktu itu.

Ketika anak pertamanya, Nadia, lahir pada 26 Mei 1970, kemudian menyusul anak kedua, Ahmad Mikail, lahir pada 10 Agustus 1974, Nurcholish dan Omi masih menempati rumah yang dipinjam oleh Hartono, seorang pengusaha yang juga tokoh PERSIS (Persatuan Islam), di daerah Tabet, Jakarta Selatan. Karena disibukkan oleh tugas-tugas sebagai ketua Umum PB HMI, Nurcholish tidak bekerja, kecuali menulis di media massa yang honorinya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Untungnya, Hartono waktu itu selalu mengirim beras dan kebutuhan pokok setiap bulan kepada para aktivis pergerakan yang dianggap bekerja untuk umat dan tidak sempat mencari nafkah.⁶⁷

Setelah melewati pendidikan di berbagai pesantren, termasuk Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, menempuh studi kesarjanaan IAIN Jakarta (1961-1968). Pasca tamat dari IAIN Jakarta, Cak Nur memperoleh kesempatan untuk melanjutkan Studi di Chicago, tepatnya ketika 1974 Fazlur Rahmand dan Leonard Binder berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya, mencari peserta untuk

⁶⁷ ibid

mengikuti seminar dan lokakarya di Universitas Chicago yang didanai oleh Ford Foundation.⁶⁸

Greg Barton menceritakan proses hijrahnya Cak Nur ke Chicago.⁶⁹

"Di Universitas Chicago, Nurcholish meminta kepada Leonard Binder untuk dapat kembali lagi dengan status mahasiswa setelah penelitian Chicago berakhir. Tetapi, ia harus kembali lagi ke Jakarta untuk mengambil bagian dari kampanye 1977. Pada bulan Maret 1978, Nurcholish kembali ke Amerika Serikat untuk mengambil program pascasarjana di Universitas Chicago, dan disana Fazlur Rahman mengajaknya untuk mengambil penelitian di bidang kajian keislaman dibawah bimbingannya dari pada kajian ilmu politik dibawah bimbingan Leonard Binder yang sejak awal telah direncanakan oleh Nurcholish Madjid."

Dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Nurcholish Madjid berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Islamic Thought (Pemikiran Islam) lulus pada tahun 1984 dengan predikat Cumlaude dan menulis disertasi dengan judul "Ibnu Taimiyya on kalam and falsafah : a problem of Reason and Revelation (Ibnu Taimiyyah dalam Kalam dan Filsafat : Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam).

Nurcholish Madjid kecil semula bercita-cita menjadi masinis kereta api. Namun, setelah dewasa malah menjadi kandidat masinis dalam bentuk lain, menjadi pengemudi lokomotif yang membawa gerbong bangsa. Sebenarnya menjadi pengemudi lokomotif politik adalah pilihan yang lebih masuk akal.

⁶⁸Nur Khalik Ridwan, *Pluralism Borjuis : Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002. Hal 60

⁶⁹Ibid

Nurcholish muda hidup di tengah keluarga yang lebih kental membicarakan soal politik ketimbang mesin uap. Keluarganya berasal dari lingkungan Nahdatul Ulama (NU) dan ayahnya, Kiai Haji Abdul Madjid, adalah salah seorang pemimpin partai politik Masyumi. Saat terjadi “geger” politik NU keluar dari Masyumi. Faktor nilai-nilai dan orientasi ideologi modernis juga tampak ditanamkan oleh keluarganya sejak ia masih muda. Ketika ibunya menerangkan perbedaan tentang pandangan dengan pak Natsir. Respon Nurcholish tentu saja mengikuti adat Jawa, yakni tetap menerimanya. Namun dalam hati, seperti diungkapkannya sendiri Nurcholish bergumam, “Pak Natsir pemimpin paling bijak di Indonesia”.⁷⁰

Hingga akhirnya Nurcholish Madjid menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Tepatnya pukul 14.05 WIB pada hari Senin, 29 Agustus 2005, dalam usia 66 tahun. Jenazah pendiri Yayasan Paramadina itu disemayamkan di kampus Universitas Paramadina, dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Keluarga, kawan dekat Cak Nur, dan tokoh nasional terus berdatangan untuk bertakziah. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla (pada masa itu). Presiden dan Wapres juga menyalati jenazah tokoh yang dikenal karena pemikiran-pemikirannya tentang Islam yang moderat dan pluralis itu.⁷¹

Para pelayat terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Cak Nur. Selain Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla, tampak Ketua

⁷⁰ Muhammad Hari Z, *op.cit.*, Hal 98

⁷¹ *Koran Kompas*, tanggal 30 Agustus 2005

MPR RI Hidayat Nurwahid, Gus Dur, Bagir Manan, Bachtiar Chamsyah, Akbar Tandjung, dan Harmoko. Bersama ratusan pelayat lain, mereka bershalat jenazah yang diimami Quraish Shihab.⁷²

2. Perjalanan Politik Nurcholish Madjid

Berawal dari aktivitasnya semenjak menjadi santri di pondok pesantren Gontor dan mahasiswa, Nurcholish Madjid memulai pula petualangan intelektualnya yang kemudian menjadi dirinya akrab dengan dunia politik yang pada akhirnya menjadi bagian terpenting dalam kehidupannya, selagi ia menjadi mahasiswa, ia tidak hanya menjadi partisipan dalam berbagai kegiatan, tapi dengung intelegnya memang sangat vokal dalam seminar dan diskusi ilmiah. Hal yang demikian menunjukkan bahwa Nurcholish adalah sosok dengan intelektual yang tinggi sehingga mampu untuk mengantarkannya ke tampuk pimpinan organisasi kemahasiswaan.

Di Gontor saja Nurcholish Madjid aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sehingga mengantarkan ia untuk terus menuntut ilmu melalui organisasi. Seperti yang pernah di ungkapkan oleh Hartono "aktivis itu mengurus umat sehingga harus di nafkahi tanpa harus bekerja" tetapi Nurcholish tetap mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sebagai penulis di koran-koran dan majalah lainnya.

Ketika menjadi mahasiswa Nurcholish Madjid aktif di organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HMI

⁷² ibid

cabang Ciputat, dan juga pernah terpilih sebagai Ketua Umum HMI cabang Ciputat, tempat ia menimba ilmu di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun itu juga (1963) ia diangkat menjadi Ketua Badko (Badan Koordinasi) HMI Jawa Barat, yang membidangi masalah pengkaderan. Ketika itu juga Nurcholish di sibukkan untuk menghadiri kegiatan organisasi baik di Ciputat maupun di luar.

Politik praktis mulai dikenal Nurcholish saat menjadi mahasiswa. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), walaupun perjalanan menuju tampuk pimpinan pengurus besar itu tidak mudah, terlihat ketika kongres di Solo berjalan ricuh sehingga Ketua PB HMI waktu itu Sulastomo, tidak tahan dan menangis. Meminta bantuan Nurcholish Madjid untuk memberikan penjelasan. Maka Nurcholish Madjid menjelaskan panjang lebar duduk perkaranya, dengan menggunakan banyak kutipan bahasa Arab maupun Inggris. Karena Nurcholish Madjid terkenal orang yang sangat pandai dalam berbahasa. Namun, pada waktu itu sangat sedikit yang pandai dalam berbahasa Arab dan Inggris sehingga penyampaian Nurcholish sangat memuaskan para peserta kongres sangat terpukau. Hingga akhirnya ia terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 1966-1969 untuk pertama kalinya.

Ketika menjadi ketua umum PB HMI, Nurcholish aktif dalam pembentukan organisasi, pada masa itu ia bersama rekannya membentuk organisasi mahasiswa Islam Asia Tenggara, yang kemudian di beri nama Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (Permiat). Organisasi ini merupakan

gabungan dari HMI, PKPIM (Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia) dan USMS (University of the Singapore Moslem Society). Permiat dibentuk di Universiti Malaya, Petaling Jaya, dan menunjukkan Nurcholish Madjid menjadi Ketua Umumnya. Sehingga kegiatan Permiat yang paling penting adalah menyelenggarakan training-training perkaderan, yang dalam prakteknya lebih sering diadakan di Indonesia.⁷³

PB HMI menggelar kongres yang ke-9 di kota Malang pada tanggal 3-10 Mei 1969. Sebagai Ketua Umum PB HMI Nurcholish Madjid menyampaikan pidato pertanggung jawabannya di hadapan peserta kongres. Dalam perjalanan kongres yang seharusnya ia lepas tanggung jawab sebagai pimpinan. Namun, nyatanya Nurcholish Madjid terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI utk yang kedua kalinya periode 1969-1971.

Situasi politik yang mendorong untuk kembali dipilih sebagai ketua ialah munculnya isu primordial Jawa dan luar Jawa dalam menetapkan pimpinan. Beberapa aktivis HMI dari luar Jawa mendekati Nurcholish dan mengatakan bahwa kalau dia tidak menjadi ketua umum lagi, HMI akan terpecah dengan garis primitif antara Jawa dan luar Jawa. "maka dengan terpaksa saya akan menjadi ketua umum lagi pada 1969" ujar Nurcholis, yang satu jam sebelum pemilihan baru menyatakan kesediaannya.⁷⁴ Sehingga sejarah mengukir, sejak didirikan HMI pada tahun 1974 hingga sekarang (2014), Nurcholish adalah satu-satunya

⁷³ Ahmad Gaus AF, *op.cit.*, Hal 42

⁷⁴ *Ibid*

orang yang terpilih menjadi ketua umum selama dua priode (1966-1969 dan 1969-1971).

Nurcholish Madjid merupakan orang pertama yang ikut serta membentuk Yayasan Wakaf Paramadina, hingga menjadi Universitas Paramadina. Asal mula Paramadina itu yang mengandung dua makna. Pertama, *parama* dari bahasa Sanssekerta yang berarti *prima* atau *utama* (ini usulan Nurcholish), dan *dina*, dari bahasa Arab yang berarti agama (isi usulan dari Utomo).⁷⁵ Hingga akhirnya tepat tanggal 28 Oktober 1986, Yayasan Wakaf Paramadina di resmikan dengan sebuah acara di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Ia juga sebagai staff pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1972-1974), hingga akhirnya pada tahun 1998 resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar IAIN Jakarta. Perjalanan panjang yang ia lalui seorang "Pembaharu" dan pantas disebut seorang pemikir, atas pengakuan intelektualnya melalui karya-karya resmi dinobatkan sebagai "Prof. Dr. Nurcholish Madjid" yang juga merupakan Rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Dimana dahulu merupakan Yayasan Wakaf Paramadina yang digagas bersama rekan kerabatnya.

Pada tahun 1991-1992, ia pernah menjadi Guru Besar tamu di Mc Gill University, Montreal, Canada. Menjabat anggota Dewan Penasihat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) 1999, dan Anggota Tim 11 yang menyeleksi partai-partai peserta pemilu 1999. Karena jasa-jasanya kepada negara

⁷⁵ Ibid

dan bangsa, akhirnya tahun 1998 dianugerahi Bintang Mahaputra oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sejarah pernah mencatat bahwa Nurcholish Madjid pernah menjabat sebagai anggota MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) selama dua priode (10 tahun) dimasa Orde Baru pada tahun 1987-1992 dan 1992-1997. Hingga akhirnya pada tahun 2004 isu tentang pencalonan Nurcholish Madjid sebagai "Presiden RI" yang penuh perbincangan dikalangan masyarakat yang penuh pro dan kontra.

3. Karya-karya Intelektual Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid adalah sosok intelektual yang banyak mengalami kontroversi akibat pemikirannya yang kurang bisa dipahami dengan benar oleh beberapa kalangan masyarakat. Pemikirannya terutama tentang Islam yes, partai Islam no. Perkataan tersebut yang banyak menimbulkan kontroversi terhadap pemahaman sebagian orang. Pemikiran Nurcholish Madjid sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, sehingga wajar jika pemikirannya selain menimbulkan kontroversi, juga banyak dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Dalam menuangkan pikirannya Nurcholish Madjid, ia menulis beberapa buku. Tulisan pertamanya di majalah Gema Islam, Pimpinan Hamka, ketika ia masih tinggal di asrama Masjid Agung *Al-Azhar*, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam tulisannya Nurcholish Madjid menuangkan pikirannya yang menggambarkan perbenturan pribadinya dengan persepsi terhadap kenyataan

sosial politik yang dihadapinya. Adapun karya Nurcholish Madjid tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Islam Doktrin dan Peradaban

Buku ini adalah kumpulan dari sebagian makalah dari KKA (Klub Kajian Agama) yang diselenggarakan oleh yayasan Paramadina, Jakarta. Jadi gambaran tentang buku ini adalah mengenai suatu masalah tertentu seperti ketauhidan, membangun etika masyarakat, kemoderenan, dan persoalan lainnya. Jadi sudah jelas jika isi dari buku ini adalah bahan-bahan yang digunakan oleh KKA untuk mendiskusikan masalah keagamaan dan bagaimana menyelesaikannya.

Dalam tulisan tentang ketauhidan Cak Nur mengatakan “menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup, dalam gambaran grafisnya lagi seperti diberikan ajaran agama, berarti menempuh hidup mengikuti “jalan lurus” (*al-shirath al-mustaqim*).”⁷⁶ Dalam etika masyarakat Cak Nur mengatakan “telah dikemukakan bahwa rasa damai dan selaras dalam hati seorang pribadi itu diperoleh karena sikap batih yang rela dan tawakal kepada Allah”.⁷⁷

2. Cita-Cita Politik Islam

Dalam buku ini merupakan gagasan-gagasan mengenai etika dan pemikiran kehidupan bernegara. Di kontekskan dalam cita-cita politik modern. Bagaimana perpolitikan di negara yang mayoritas Islam dan di

⁷⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, op.cit., Hal 98

⁷⁷ Ibid

kontekskan dengan masyarakat yang plural. Perjalanan politik yang terjadi di era Reformasi juga menjadi analisis Nurcholish Madjid.

3. Masyarakat Religius

Buku yang berjudul “Masyarakat Religius” dimana Nurcholish Madjid menuliskan tentang kehidupan dalam masyarakat dengan membumikan nilai Islam dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis ke dalam kehidupan masyarakat.

Dalam tulisannya ia menulis tentang hubungan dunia dan akhirat “seorang yang ingin menginginkan kebahagiaan ukhrawi tidak dengan sendirinya akan sekaligus memperoleh kebahagiaan duniawi. Keduanya akan menjadikan program hidup serentak dengan perhatian dan kesadaran yang seimbang”.⁷⁸

B. Sejarah Partai Politik Islam

Berdirinya partai politik Islam tidak terlepas dengan adanya pengumuman pemerintah pasca kemerdekaan 1945, pemberitaan yang mendorong rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik sebagai wadah kegiatan politik yang mengatur tatanan pemerintahan. Tanggapan umat Islam ketika itu dengan segera mendirikan partai politik Islam, berikut ini sejarah partai politik Islam sejak awal Pemilu 1955, Orde Baru dan era Reformasi:

⁷⁸ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan*, Jakarta: Paramadina 2010, Hal 142

a. Pemilihan Umum 1955

Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Republik Indonesia, ada 6 partai politik Islam yang menjadi peserta pemilihan umum:

1. Masyumi

Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) resmi menjadi partai politik dengan Asas Islam pada tanggal 7 November 1945 melalui sebuah Kongres Umat Islam di Yogyakarta. Awalnya, Masyumi adalah organisasi sosial-keagamaan yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI. Tujuan didirikan partai ini adalah menjadi satu-satunya partai politik umat Islam pasca kemerdekaan serta terwujudnya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat dan negara menuju keridhaan ilahi.⁷⁹

Tokoh-tokoh Masyumi antara lain Hasyim Asy'arie dan Wahid Hasjim (NU), Agus Salim (PSII) dan Syekh Djamil Djambek (Pembaharu dari Sumatera Barat). Mereka adalah anggota Majelis Syuro Masyumi. Sedangkan pengurus besar terdiri dari para politisi senior seperti Muhammad Natsir (Persis), Mohammad Roem, Soekiman, Abikusno dan Kartosuwiryo. Selain itu, ada juga Hamka dan Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Syafrudin Prawiranegara, Muhammad Isa Anshari, dan Anwar Hardjono. Di tengah perjalanan, keutuhan Masyumi tidak bertahan lama. Satu persatu para pendukungnya meninggalakan dan mendirikan partai politik sendiri. Mula-mula adalah PSII yang mundur pada

⁷⁹ Ridho Alhamdi, *Partai Politik Islam, teori dan praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 Hal 55-56

bulan Juli 1947 dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik independen. Pada tahun 1952 di susul oleh NU yang juga memproklamkan diri sebagai partai Islam.⁸⁰

2. Partai Nahdatul Ulama (Partai NU)

Sebelum menjadi partai politik, Nahdatul Ulama merupakan organisasi sosial Islam. Organisasi Islam yang didirikan di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 sebagai usaha menahan perkembangan paham pembaru dalam Islam di Tanah Air, serta usaha mempertahankan ajaran tradisional dan mazhab di Tanah Suci yang baru dikuasai golongan Wahabi di bawah Raja Abdul Aziz bin Sa'ud.⁸¹

Partai Nahdatul Ulama (Partai NU) lahir atas kekecewaannya terhadap Partai Masyumi. Disebabkan terjadinya perubahan sikap Masyumi yang awalnya menghormati dan memberikan arti penting pada ulama, berubah menjadi tidak menghormati ulama lagi. Selain itu, di berbagai kesempatan semakin nampak kurang serasian antara pimpinan NU dengan Masyumi dan tidak diterimanya calon menteri agama dari NU di Kabinet Wilopo yang pada akhirnya menjadi dasar bagi NU untuk menarik diri dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik yang dikukuhkan dalam kongres NU di Palembang, Oktober 1952. Karena itu, NU yang awalnya merupakan organisasi sosial-keagamaan dengan basis massa di kalangan muslim pedesaan berubah menjadi partai politik sejak tahun 1952. Partai ini berasaskan Islam dengan tujuan menegakkan syariat Islam, dengan berhaluan pada salah satu empat madzhab dalam Islam serta

⁸⁰ ibid

⁸¹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung: Mizan 2000, Hal 85

melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai asas negara.⁸²

3. Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII)

Partai Syarikat Islam Indonesia sering membanggakan dirinya sebagai partai tertua di Indonesia karena ia memang berasal dari Sarekat Dagang Islam (1911) dan Sarekat Islam (1912). Tetapi sebab langsung maka partai tersebut didirikan kembali, padahal sebelumnya telah ada kebulatan tekad untuk melihat Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam, ialah usaha formatir Amir Syarifuddin membentuk kabinet pada tahun 1947 yang ingin mengikut sertakan kalangan Islam tetapi ditolak oleh Masyumi. Rupanya, kalangan PSII terpancing oleh ajakan Amir Syarifuddin, mereka bersedia duduk dalam kabinet yang ia bentuk.⁸³

Tujuan PSII adalah membangun persatuan yang tersusun rapat di kalangan umat Islam, yang teratur dengan aturan mencukupi perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW dalam segala bidang kehidupan, pencaharian dan pergaulan. Sejalan dengan itu, PSII membangun kekuatan untuk mendapatkan hak menguasai segenap tumpah darah negeri sehingga menjadi semakin kuat dalam persatuan umat Islam sedunia. Selain itu, berdirinya partai ini bertujuan untuk menjaga hubungan antar umat Islam di berbagai bangsa dan negara yang membawa

⁸² Ridho Alhamdi, *op.cit.*, Hal 56-57

⁸³ Deliar Noer, *op.cit.*, Hal 81

manfaat untuk bersamaan. Pasca Pemilu 1971, PSII tak lagi bisa ikut dalam Pemilu hingga akhir rezim Orde Baru akibat kebijakan fusi partai Islam.⁸⁴

4. Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti)

Partai politik Perti berasal dari organisasi tradisional Islam. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang berpusat di Bukittinggi, Sumatra Tengah (Sumatra Barat sekarang). Organisasi ini didirikan di suatu pesantren terkenal di Candung, dekat Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 1930. Ia merupakan benteng pertahanan golongan tradisional Islam terhadap penyebaran paham dan gerakan modern. Pendirinya termasuk Syaikh Abbas dari Padang Lawas, Bukittinggi, Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli dari Candung dan Syaikh Muhammad Djamil Djaho dari Padang Japang, Payakumbuh, semuanya ulama tradisional terkenal di Minangkabau yang mempunyai surau-surau besar. Walaupun dalam hal pendidikan para ulama ini relatif cepat memasukkan cara-cara persekolahan modern (umpamanya Syaikh Abbas memulainya tahun 1918).⁸⁵

Tidak seperti NU dan PSII, Perti sejak awal kemerdekaan Indonesia telah menjadi partai politik mandiri dengan gerakannya yang eksklusif. Dalam Pemilu 1955, partai Perti mendapatkan empat kursi di DPR RI dan tujuh kursi di Majelis Konstituante. Namun, setelah Majelis Konstituante dan DPR RI dibubarkan oleh Soekarno, partai Perti mendapatkan dua kursi di DPR Gotong Royong. Pada masa Demokrasi Terpimpin, partai Perti bersama-sama dengan PSII, partai NU dan Masyumi tergabung dalam liga muslim yang mendukung gagasan Nasakom. Pada

⁸⁴ Ridho Alhamdi, *op.cit.*, Hal 58

⁸⁵ Deliar Noer, *op.cit.*, Hal 77

masa pemerintahan Orde Baru, partai Perti bersama partai Islam lainnya difusikan menjadi PPP⁸⁶ (Partai Persatuan Pembangunan).

5. Partai Politik Tarekat Islam (PPTI)

Partai Politik Tarekat Islam (PPTI) merupakan partai Islam yang menjadi kontestan pada Pemilu 1955. Hasil Pemilu 1955 menunjukkan, bahwa PPTI berada pada tingkat ke-23 untuk DPR RI dengan memperoleh total keseluruhan 85.131 suara atau 0,22% dan mendapatkan jatah 1 kursi di parlemen. Namun, tidak mendapat kursi di parlemen tingkat provinsi. Sedangkan hasil suara untuk Majelis Konstituante, PPTI berada pada urutan ke-26 dengan memperoleh 74.913 suara.⁸⁷

PPTI merupakan partai kecil yang merepresentasikan kelompok Islam yang menganut aliran mistik dengan basis pemilih di Sumatera terutama di Sumatera Tengah (jika sekarang meliputi kawasan Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau).⁸⁸

6. Partai AKUI

Partai Aksi Kesatuan Umat Islam (Partai AKUI) termasuk juga partai yang berkontestasi pada pemilu 1955. Feith mengategorikan AKUI sebagai *A Small Group Party of Regional Significance* dengan basis utama di Provinsi Jawa

⁸⁶ Ridho Alhamdi, op.cit., Hal 58

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

Timur. Secara politik, partai AKUI cenderung dengan Masyumi. Pada pemilu 1955, partai ini berada di peringkat ke-24, tepat setelah PPTI.⁸⁹

Partai AKUI berhasil meraih 81.454 suara untuk DPR RI atau setara dengan 0,2% dan hanya mendapat jatah 1 kursi di parlemen. Sedangkan suara untuk Majelis Konstituante, partai AKUI berada pada peringkat 24 (diatas PPTI) dengan jumlah suara 84.862.⁹⁰

b. Pemilahan Umum era Orde Baru

Hingga akhirnya pada Pemilu selama era Orde Baru, terdapat lima partai politik Islam yaitu partai NU, Parmusi, PSII, Perti dan PPP. Diantaranya hanya dua partai yang akan di bahas, karna tiga partai sudah di bahas sebelumnya:

1. Parmusi (Partai Muslimin Indonesia)

Kelahiran Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) merupakan kesepakatan antara mantan petinggi Masyumi yang gagal merehabilitasi partainya dengan rezim yang berkuasa saat itu. Soeharto mengizinkan berdirinya partai baru tersebut dengan catatan Masyumi tidak boleh lagi masuk jajaran pimpinan Parmusi. Setelah melalui perdebatan dan perjuangan yang panjang, Parmusi dapat di dirikan secara resmi pada tanggal 20 Februari 1968 dengan Ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekretaris Jendral Lukman Harun, yang keduanya adalah aktivis Muhammadiyah. Namun, kedekatan dua pimpinan tersebut dengan tokoh senior Masyumi mengakibatkan mereka disingkirkan dari partai oleh

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid

penguasa Orde Baru dengan cara negara merekayasa adanya konflik di internal partai melalui manuver politik HJ. Naro.⁹¹

2. PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan pada tanggal 5 Januari tahun 1973 di bawah Ketua Pimpinan Suryadharma Ali, dengan Sekjend Irgan Chairul Mahfidz. Ideologi PPP adalah Islam.⁹² Partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSSI), Perti dan Parmusi. Ketua sementara partai itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.⁹³

Basis pendukung PPP tentu dari kalangan umat Islam yang sebelumnya bergabung dalam partai NU, Parmusi, PSII dan Perti. Secara lebih detail, pengikut Parmusi yang tergabung dalam PPP disebut dengan MI. MI memiliki kecenderungan kuat sebagai kelompok modernis. Kecenderungan ini tercermin dari asal usul anggota MI yang berada di PPP, yang sebagian besar dari HMI, PII, *Al Washila*, dan Muhammadiyah yang kedua organisasi ini merupakan pendukung utama Masyumi di era Orde Lama. Garis hubungan MI dan Masyumi menjadi semakin jelas jika dikaitkan dengan Parmusi. Namun, sebenarnya jika dilihat dari

⁹¹ ibid

⁹² Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam, Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012, Hal 227

⁹³ ibid

basis pendukungnya, MI merupakan representasi dari kelompok yang mengambang. Keterlibatan para politisi MI yang ada di PPP lebih bersifat personal dan hampir tidak ada hubungannya dengan organisasi masa pendukungnya, baik Muhammadiyah, HMI, PII, bahkan Masyumi.⁹⁴

Sedangkan tujuan PPP ada dua tujuan sekaligus: pertama, berdasarkan Islam PPP hendak mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Swt dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, dan kedua mewujudkan tatanan politik yang demokratis yang dilandasi akhlakul karimah serta mengembangkan kehidupan yang Islami. Untuk meraih tujuan ini PPP melakukan upaya yang diletakkan dalam kerangka dakwah amar makruf nahi mungkar dengan landasan akhlakul karimah serta tidak keluar dari konstitusi dan cara-cara yang demokratis.⁹⁵

c. Pemilihan Umum era Reformasi

Selama era reformasi (1999, 2004, 2009 dan 2014), jumlah partai politik Islam ada 24 yang terdata, yaitu :

1. Partai Abul Yatama (PAY)

Tidak seperti partai-partai lain yang selalu mengetengahkan nuansa demokrasi, persatuan, kerakyatan, ataupun keagamaan. Berdirinya PAY justru diilhami oleh keinginan untuk menyadarkan semua orang agar lebih memperhatikan nasib anak yatim. PAY didirikan di Jakarta, 7 Januari 1999

⁹⁴ Ridho Alhamdi, op.cit., Hal 77

⁹⁵ Zuly Qodir, op.cit., Hal 235

dengan asas pancasila. Ketua Umum adalah Dr. H. Rusli Bintang dan Sekretaris Jenderal adalah Drs. Agus Suarman Sudharsa.⁹⁶

Penekanan partai ini sesuai dengan arti *abul yatama* (ayah anak yatim), yang pada mulanya berupa yayasan penyantun anak yatim yang sejak tahun 1979 sudah berdiri di Provinsi Aceh (NAD, dulu bernama Daerah Istimewa Aceh atau DIA). PAY ingin menyadarkan semua orang bahwa begitu banyak kepentingan politik telah merampas hak-hak anak yatim. Menurut PAY, mereka harus diperjuangkan agar dapat memperoleh kehidupan orang layak. Di samping itu juga, PAY mendesak agar anak yatim tidak hanya memiliki wadah untuk menuntut ilmu, tetapi juga dalam menyalurkan aspirasi politiknya.⁹⁷

2. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai yang berasaskan pancasila, didirikan oleh Amin Rais (mantan ketua PP Muhammadiyah). Di tengah hingar-bingar peristiwa menjelang turunnya Soeharto, kita tidak bisa melupakan peran sang reformis bernama Amin Rais. Kedudukannya sebagai ketua Muhammadiyah semakin membuat kritikan-kritikannya didengar oleh penguasa. Seiring turunnya Soeharto di internal warga Muhammadiyah muncul keinginan untuk mendirikan partai baru. Hal itu mencuat ketika Sidang Tanwir Muhammadiyah, 5-7 Juli 1998 di Semarang. Di akhir sidang, forum tersebut memberikan amanat kepada PP Muhammadiyah untuk melaksanakan ijtihad politik dalam rangka mencapai maslahat umat dengan berlandaskan semangat

⁹⁶ Ridho Alhamdi, *op.cit.*, Hal 96

⁹⁷ *Ibid*

dakwah *amar makruf nahi mungkar*. Sinyal itu ditangkap positif oleh Amien, bahwa ada kerinduan warga Muhammadiyah untuk mempunyai partai yang dapat menyalurkan aspirasi mereka. Pada akhirnya, ijtihad politik tersebut diungkapkan pada pembentukan sebuah partai.⁹⁸

Sebelum di resmikan Partai Amanat Nasional (PAN), nama awal partai itu adalah Partai Amanat Bangsa (PAB) dengan usulan ketua yaitu Ahmad Syafii Ma'arif. Namun, Syafii menolak tegas dengan tawaran tersebut. Dengan perkataan "biarkan saya menjaga Muhammadiyah, anda saja yang ke partai" perkataan tersebut di tujukan ke Amien Rais pada waktu itu. Dan di suatu sisi ada tawaran Amien untuk memimpin di PPP, namun tawaran tersebut di tolak dengan alasan rasional. Karena Amien orang baru di PPP, kemudian konsen untuk meneruskan pembentukan partai baru. Tibalah saatnya pendirian partai baru dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1998 di Wisma Tempo Sinargalih, Jawa Barat. Pertemuan tersebut memutuskan nama Partai Amanat Nasional (PAN), yang dihadiri oleh tiga kelompok, yaitu kelompok PPSK Jogja, kelompok Tebet, dan kelompok MARA.

Deklarasi PAN dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan, Jakarta yang di saksikan sekitar 15 ribu manusia. PAN menetapkan basis massa utama dari kalangan muslim modernis, terutam kalangan warga Muhammadiyah.⁹⁹ Visi kepartaian adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur,

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Ibid

pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta di ridhoi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa (YME). Prinsip dasar PAN adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-citanya berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. PAN mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom dan mandiri. Karena itu, partai ini menghormati dan mendorong kemajemukan. Selain itu, PAN menjunjung tinggi demokrasi dan menentang segala bentuk kediktatoran, karena hal itu berlawanan dengan harkat dan martabat manusia.¹⁰⁰

3. Partai Bintang Reformasi (PBR)

Partai Bintang Reformasi (PBR) didirikan dan dideklarasikan pada tanggal 20 Januari 2001 dengan Ketua Umum Zaenuddin MZ dan Sekjend Dja'far Badjeber. PBR merupakan nama baru dari Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi). Partai ini berasas Islam dengan mengedepankan nasionalisme dan merupakan hasil penggabungan empat partai, yaitu PIB, PUMI, KAMI dan Partai Republik.¹⁰¹

Ketua Umum DPP PBR saat ini adalah Bursah Zarnubi, SE, yang terpilih dalam Mukhtar PBR di Bali pada April 2006, menggantikan KH. Zaenuddin MZ. Di bawah kepemimpinan Bursah Zarnubi, PBR telah berhasil mengembangkan infrastruktur partai di 33 Provinsi dan mencakup 80% Ranting (kelurahan/desa) di seluruh Indonesia. Selain itu, PBR juga didukung oleh

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Ibid

puluhan LSM, ormas, para Ulama dan Cendekiawan, pedagang, mahasiswa, buruh dan petani. PBR mempunyai tujuan untuk memperbaiki kepemimpinan nasional, pemerataan ekonomi dan penegakan hukum yang selaras dengan cita-cita partai untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin, adil, mandiri dan demokratis yang diridhai Allah SWT.¹⁰²

Visi PBR adalah partai gerakan yang terbuka bagi semua golongan, sebagai alat perjuangan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, dan menuntaskan agenda reformasi bangsa Indonesia.¹⁰³

Misi PBR adalah mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang sejahtera, adil, mandiri dan demokratis yang diridhoi Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰⁴

4. Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai yang berasaskan Islam dan didirikan pada tanggal 17 Juli 1998 Jakarta. Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SH Msc dan Sekretaris Jendral MS Ka'ban SH MSc. Partai yang menamakan diri Bulan Bintang sebuah sebutan bagi keluarga besar pendukung Masyumi setelah partai tersebut dibubarkan ini tidaklah identik dengan partai Masyumi, meskipun ada keterkaitan psikologis. Ide besar dari partai ini menurut

¹⁰² Zuly Qodir, op.cit., Hal 259-260

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid

ketua umumnya adalah *Islamic Modernism*, yaitu meyakini bahwa Islam adalah ajaran universal yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka, baik di dunia maupun akhirat. PBB memperjuangkan tegaknya sistem yang kuat, bukan figur orang.¹⁰⁵

Partai ini mengikuti Pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, PBB mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.¹⁰⁶

Namun, partai yang memperjuangkan syari'at Islam ini masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak Muktamar ketiga, April 2010 di Medan, partai ini telah menetapkan kembali Ketua Umum: MS. Kaban, Sekjend: BM Wibowo Hadiwardoyo (mantan Sekjen Ormas Islam Hidayatullah), Ketua Majelis Syura: Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Dewan Kehormatan Partai: Fuad Amsyari.¹⁰⁷

Visi PBB semakin jelas dapat dilihat dari asas yang dipergunakan yakni Islam. Islam dipandang sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang bersifat universal. PBB akan mempergunakan prinsip-prinsip universal sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menelkung masyarakat dan bangsa seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, praktik penyalahgunaan

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Ridho Alhamdi, op.cit., Hal 98

kekuasaan, kepentingan hubungan pusat dan daerah, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan seterusnya. Oleh sebab itu, hal yang paling penting dari PBB adalah prinsip Islam universal harus menjadi jiwa, semangat dan gerak langkah partai.

Adapun misi dan tujuan partai terdiri dua hal. (a) tujuan umum partai adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. (b) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara tujuan khususnya adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰⁸

5. Partai Cinta Damai (PCD)

Partai Cinta Damai (PCD) merupakan partai politik sosial keagamaan bersifat terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Partai ini didirikan dan dideklarasikan di Jakarta, 10 September 1998 atau di Bogor, 17 Oktober 1998 dengan asas Pancasila. Ketua Umum: Drs. H. Iskandar Zulkaranain, SH dan Sekretaris Jendral: Drs. H. Syahril Malik. Berawal dari organisasi keagamaan yang dikenal sebagai Majelis Tarikatullah yang bernaung di bawah sebuah yayasan yang terdapat di beberapa kota, partai ini mempunyai basis pendukung dari Badan Koordinasi Surau (BKS) yang terdapat di tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.

¹⁰⁸ Ibid

Dengan prioritas utama pembinaan mental spritual, partai ini mendasarkan ciri pengalaman *dzikrullah* sebagai fundamen *Dienul Islam* yang inti maknanya adalah cinta damai dan rahmat bagi alam semesta. Untuk itu, dasar perjuangan partai diwujudkan dalam bentuk piagam pengabdian kepada Allah SWT, bangsa, negara, dunia serta kepada manusia dan perikemanusiaan.¹⁰⁹

6. Partai Indonesia Baru (PIB)

Partai Indonesia Baru (PIB) merupakan partai hasil fusi dari sembilan partai dengan visi yang sama, yaitu nasional religius. Sembilan partai tersebut adalah Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Kesatuan Umat Indonesia, Partai Perjuangan Amanat Rakyat Indonesia, Partai Amanat Rakyat Madani, Partai Indonesia Raya, Partai Penyantun Perkembangan Islam, Partai Era Reformasi Tarbiyah Islamiyah, Partai Aliansi Rakyat Miskin dan Partai Kepentingan Rakyat. PIB adalah partai berasas Pancasila yang didirikan di Jakarta 18 Januari 1999. Ketua Umum: Drs. HM. Syaiful Anwar dan Sekretaris Jenderal: Drs. H. Zakirudin Djamin, SH., MM.

Walaupun dibentuk oleh sebagian besar tokoh Islam, PIB menolak dikatakan sebagai partai Islam karena tidak mau menutup pintu terhadap simpatisan non Islam. Namun, PIB amat menentang sekularisme dan memilih bentuk masyarakat madani yang berwawasan agama.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Ibid

7. Partai Islam Demokrat (PID)

Undang-undang kepartaian yang memperbolehkan setiap warga negara mendirikan partai, mendorong lahirnya Partai Islam Demokrat (PID) yang cikal bakalnya ormas GM Kiara. GM Kiara berdiri pada tanggal 21 Agustus 1991 yang berpusat di Jl. Pondok Rajeg No.19 RT 002/03, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor. GM Kiara merupakan ormas yang independen dan memiliki tujuan menjadi wadah pembentukan kader-kader yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri serta sebagai wadah berkarya dan penyalur aspirasi pemuda sesuai dengan sifat pemuda yang kreatif dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas GM Kiara adalah Pancasila dan UUD 1945.¹¹¹

Karena PID bersifat demokrat, maka tidak ada alasan bagi PID untuk bergabung dengan partai Islam lainnya yang dianggap beraliran fundamentalis dan gari keras. Asas PID adalah Pancasila. Partai ini didirikan di Jakarta, 15 Oktober 1998 dengan Ketua Umum adalah Drs. H. Andi Rasyid Djalil dan Sekretaris Jendral adalah Imam Dipowinoto. PID memiliki tujuan mengangkat harkat dan martabat bangsa sesuai ajaran Islam dan menjunjung tinggi musyawarah dalam kehidupan demokrasi.¹¹²

¹¹¹ Ibid

¹¹² Ibid

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun Hijriyah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (26 Rabi'ul Awwal 1419 H).¹¹³

Gerakan-gerakan Islam mulai menguasai masjid-masjid sebagai pusat gerakan, terutama masjid kampus. Gerakan ini semakin membesar dan mengental ke berbagai daerah di tanah air melalui jalur tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan. Meskipun masih dalam bayang-bayang kekuasaan Orde Baru. Peristiwa lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi pertanda di kalangan aktivis dakwah Islam untuk melahirkan iklim baru bagi cita-cita mereka, yaitu mewujudkan sebuah bangsa dan negara yang diridhai Allah SWT. Karena itulah, mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang.¹¹⁴

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmandi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei

¹¹³ Zuly Qodir, *op.cit.*, Hal 221

¹¹⁴ Ridho Alhamdi, *op.cit.*, Hal 99-100

2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.¹¹⁵

KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) disebut-sebut sebagai sayap muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan Tarbiyah menjadi pengajarannya. Dengan Sayyid Qutb dan Yusuf Qordhowi yang menjadi panutannya. PKS juga menjadikan Lembaga Dakwa Kampus (LDK) sebagai sumber rekrutmen kader.¹¹⁶

Visi PKS adalah sebagai penyeru kebenaran dengan memperhatikan seluruh kekuatan sumber daya manusia partai untuk memberikan perhatian pada persoalan kehidupan masyarakat. Keadilan harus ditegakkan karena merupakan perintah universal sebagaimana tercantum dalam banyak ayat Al-Qur'an sehingga harus diperjuangkan dalam seluruh dimensi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.¹¹⁷

Sedangkan misi dan tujuan PKS adalah sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hendaknya memiliki tanggung jawab rabbaniyah. Masyarakat selayaknya menyingkirkan sikap sipil personality, pragmatis dan oportunistis, yaitu hanya mau melaksanakan ajaran agamanya yang dinilai menguntungkan, sedangkan dipandang merugikan atau beresiko dibuang

¹¹⁵ Zuly Qodir, op.cit., Hal 221

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ Ibid

jauh-jauh. Penggunaan asas Islam adalah karena Islam adalah *rahmatan lil alamin*, karena itu perjuangan partai adalah mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.¹¹⁸

9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Tidak bisa dipungkiri bahwa PKB merupakan partai politik warga NU, karena secara historis partai ini lahir dari dalam organisasi NU. Selepas runtuhnya Orde Baru 1998, banyak usulan masuk ke dan dari kalangan tradisional ke PB NU untuk masuk ke gelanggang politik. Ada mengusulkan agar NU sendiri langsung bermetamorfosis menjadi partai politik. Lebih jauh lagi, warga NU bahkan sudah banyak yang mengusulkan nama untuk partai yang mereka inginkan, tidak kurang dari 39 nama sempat tercatat. Sebagian besar dari mereka mengusulkan lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU. Selain itu, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH. M. Cholil Bisri dan PW NU Jawa Barat.¹¹⁹

Melihat kuatnya dorongan dari bawah tersebut, pada 3 Juni 1998 PB NU membentuk Tim Lima yang bertugas mempersiapkan berdirinya partai untuk warga NU. Setelah tim dibentuk, usulan dari warga NU semakin deras. Untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya

¹¹⁸ ibid

¹¹⁹ Ridho Alhamdi, op.cit., Hal 100-101

usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PB NU tanggal 20 Juni 1998 memberi surat tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga, dibentuk Tim Asistensi yang bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membawa warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU. Setelah melalui proses yang panjang, maka tanggal 23 Juli 1998 resmi dideklarasikan berdirinya PKB di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan.¹²⁰

10. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (Partai KAMI)

Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI) didirikan pada tanggal 29 Agustus 1998. Ketua dan sekjennya adalah Drs. H. Syamsahril SH., MM dan Djamhari Maskat. Asas partai adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya adalah untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, terutama masalah disintegrasi bangsa. Di samping itu, partai ini juga bermaksud memperingatkan bangsa Indonesia agar terhindar dari laknat Allah SWT yang sedang menggerogoti seperti kritis yang berkepanjangan dalam berbagai aspek kehidupan. Partai ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif muslim Indonesia untuk membangun manusia seutuhnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perolehan suara pada Pemilu 1999

¹²⁰ Ibid

termasuk kecil sehingga pada tahun 2002 bersama beberapa partai Islam lainnya berfusi menjadi PBR.¹²¹

11. Partai Kebangkitan Umat (PKU)

Berawal dari perbedaan visi sebagian tokoh NU dengan PKB bentukan PB NU, dibentuklah Partai Kebangkitan Umat (PKU) sebagai wadah penerus perjuangan jami'iyah NU di jalur politik. Berbeda dengan PKB, partai ini melandaskan keberadaannya sebagai partai Islam murni dengan mencantumkan pancasila dan aqidah Islam *Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah* sebagai asasnya. Walaupun begitu PKU tidak menginginkan Indonesia menjadi negara Islam dan tidak pula menjadi negara sekuler.¹²²

PKU didirikan di Jakarta, 21 September 1998 dan juga mendeklarasikan di Jombang, 25 Oktober 1998. Ketua Umumnya adalah KH. Yusuf Hasyim dan Sekretaris Jendral adalah Drs. H. Asnawi Latief. Secara umum, PKU bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur dan diridhai Allah SWT melalui tatanan kenegaraan yang demokratis dan berakhlak mulia. Secara khusus, PKU ingin memperjuangkan masuknya nilai-nilai Islam yang relevan ke dalam peraturan perundang-undangan.¹²³

12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) didirikan pada tanggal 21 November 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur.

¹²¹ Ibid

¹²² Ibid

¹²³ Ibid

Partai ini bisa diartikan sebagai alat politik para ulama untuk memperjuangkan kebangkitan nasional sebagai perwujudan rasa cinta tanah air. Ideologinya adalah Islam. Visinya adalah menciptakan negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera (*baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur*) sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air. Ketua Umumnya adalah Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal adalah Idham Cholied.¹²⁴

Misi PKNU tercermin dari tiga bentuk tanggung jawab yang diemban ulama. *Pertama*, tanggung jawab yang berkaitan dengan agama Islam (*diniyyah Islamiyyah*). Yakni ulama menjadi penjaga keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan aqidah *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* sebagai kerangka berfikir dan bertindak dalam beragama dan berbangsa sehingga antara agama dan negara tumbuh bersama saling mengisi dan tercapai harmonisasi. *Kedua*, tanggung jawab yang dipikul ulama adalah berkaitan dengan umat. Yakni ulama berupaya memenuhi tuntutan umat atas tiga hal yang menjadi kebutuhannya, antara lain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan bersifat aksesoris. Kebutuhan umat baik yang primer, sekunder maupun aksesoris ini menjadi tanggung jawab ulama untuk memenuhi agar tercapai kesejahteraan. *Ketiga*, tanggung jawab ulama yang berkenaan dengan berbangsa dan bernegara. Terkait tanggung jawab ini, para ulama meyakini bahwa NKRI adalah final. Keyakinan harus senantiasa dikawal melalui perjuangan politik ulama agar cita-cita negara

¹²⁴ Ibid

Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.¹²⁵

Partai Kebangkitan Nasional Ulama adalah salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor 34.¹²⁶ Inilah partai yang pimpinannya adalah Choirul Anam setelah sebelumnya adalah Salahuddin Wahid, adik kandung Abdurrahman Wahid yang menjadi Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kakak beradik bertarung dalam konteks politik nasional yang hendak mendulang suara dari “rumah yang sama” yakni tradisi Nahdatul Ulama yang memiliki pengalaman politik jauh lebih kuat ketimbang Muhammadiyah.¹²⁷

13. Partai Masyumi Baru (PMB)

Partai ini bukanlah partai yang muncul setelah era reformasi. Pada tahun 1955, partai ini telah hadir dengan nama organisasi Majelis Syarikat Umat Muslimin Indonesia. Tahun berikutnya, diikrarkan kembali sebagai wadah perhimpunan dan penampung aspirasi umat muslimin dengan nama Masyumi Baru. Walaupun menggunakan nama “Masyumi”, partai ini menolak dikatakan sebagai lanjutan dari Partai Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama.¹²⁸

Partai ini berasaskan Islam. Didirikan dan dideklarasikan di Jakarta, 28 Oktober 1995 dan 24 November 1995. Dilakukan juga ikrar pemantapan di Jakarta, 20 Januari 1996. Ketua Umum adalah Drs. H. Ridwan Saidi dan

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Zuly Qodir, *op.cit.*, Hal 255

¹²⁷ Ridho Alhamdi, *op.cit.*, Hal 103

¹²⁸ Ibid

Sekretaris Jenderal adalah H. Fairuz Basyar. Partai Masyumi Baru yang berbasis kelompok Islam modernis ini, mendukung pemikiran ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan mengharuskan pelaksanaan prinsip *trias politica* dalam kehidupan bernegara. Partai ini menginginkan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan menolak diskriminasi dalam segala bentuk.¹²⁹

14. Partai Matahari Bangsa (PMB)

Partai Matahari Bangsa atau PMB adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 16 Desember 2006 oleh kader muda Muhammadiyah dengan asas Islam. Meskipun begitu, partai ini bukan merupakan bagian dari Muhammadiyah.¹³⁰ Ketua Umum PP PMB adalah Imam Addaruqutni (mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 1998-2002), Sekjendnya adalah Ahmad Rofiq (mantan ketua umum DPP IMM periode 2003-2006). Pimpinan PMB lainnya adalah Ma'mun Murod Al-Barbasy, Sudar Sindaes, Fa'ozan Amar, Manager Nasution (aktivis PM), Laili Nailulmuna (aktivis NA), Ahmad Imam Mujadid Rais dan Sanusi Ramadhan (aktivis IRM/IPM), dan lain sebagainya. Berdirinya PMB juga mendapat restu dari sejumlah petinggi Muhammadiyah seperti Din Syamsuddin dan Hajriyanto Y. Tohari yang juga mantan politisi dan politisi Golkar. Hanya saja, usulan nama "PMB" dari ide Jeffrie Geovanni (politisi Golkar) yang kemudian disepakati untuk nama partai. Struktur PMB dengan mudah dapat terbentuk di tingkat Provinsi dan

¹²⁹ Ibid

¹³⁰ Zuly Qodir, *op.cit.*, Hal 247

kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan “menunggangi” struktur Muhammadiyah di berbagai level.¹³¹

PMB merupakan partai “Islam berkemajuan” yang meletakkan landasan perjuangannya kepada prinsip-prinsip Islam *rahmatan lil ‘alamin*, terbuka terhadap kemajuan, cinta damai dan menghargai kemajemukan agama, budaya dan etnisitas. PMB meyakini, bahwa Islam dapat membawa rakyat Indonesia menuju kesejahteraan material dan spritual. Karena itu, tujuan perjuangan partai ini adalah menjaga kemuliaan Islam dengan jalan mengupayakan pemenuhan kebutuhan rakyat dalam berbagai sektor kehidupan.¹³² PMB ingin menjawab sinisme sebagian masyarakat terhadap partai politik Islam yang dinilainya hanya menjual (simbol) Islam. Kehadiran PMB yang berasaskan Islam bukan sekedar “latah” , tetapi ingin megusung misi ideal Islam sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah dengan memerhatikan konteks sosial politik yang melingkupinya.¹³³

PMB telah lolos verifikasi administrasi sekaligus verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2009 dan mendapat nomor urut 18.¹³⁴ Namun, apa dikata PMB hanya mendapatkan suara 0,8% pada Pemilu 2009. Hal seperti itu tampak pada pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat tingkat dua sampai tingkat pusat. Antara aktivis Muhammadiyah tua (PAN) bertarung dengan aktivis Muhammadiyah muda (PMB), dan dimenangkan oleh

¹³¹ Ridho Alhamdi, *op.cit.*, Hal103-104

¹³² *Ibid*

¹³³ Zuly Qodir, *op.cit.*, Hal 251-252

¹³⁴ *Ibid*

aktivis muhammadiyah tua sehingga PAN tetap bertahan dalam tujuh besar partai yang memperoleh suara Pemilu 2009.¹³⁵

15. Partai Nahdatul Ummat (PNU)

Partai Nahdatul Ummat (PNU) didirikan oleh para mubaligh yang tergabung dalam Ittihadul Mubalighin (IM) sebagai respons terhadap aspirasi cabang-cabangnya di daerah. Walaupun para pengurus terasnya berasal dari unsur Nahdatul Ulama (NU), namun partai ini tidak bermaksud menandingi kehadiran PKB bentukan PBNU. Partai NU memakai jalur dakwah dan majelis taklim sebagai jaringannya, karena memang IM sendiri sejak lama sudah memiliki organisasi pendukung seperti Mubalighat NU dan Persatuan Majelis Taklim.¹³⁶

Asas PNU adalah Pancasila dan beraqidah Islam *mab'da Ahlussunnah Wal-Jama'ah*. Didirikan dan dideklarasikan di Jakarta, 16 Agustus 1998. Ketua Umum adalah KH Sjurkron Ma'mun dan Sekretaris Jenderal adalah KH Achmad Sjatari. Partai yang menandakan *mab'da Ahlussunnah Wal-Jama'ah* sebagai spiritnya ini dalam program kerjanya mengutamakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan berusaha memperjuangkan terciptanya pemerintahan yang bersih.¹³⁷

16. Partai Persatuan (PP)

Partai Persatuan (PP) didirikan oleh H. Jaelani Naro dan beberapa tokoh lainnya dari PPP karena kecewa atas hasil Muktamar PPP. Tujuan didirikannya

¹³⁵ Ibid

¹³⁶ Ridho Alhamdi., op.cit., Hal 104

¹³⁷ Ibid

partai ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggembosi PPP, justru menampung kader PPP agar tidak lari ke partai lain. Partai dengan lambang gambar bintang berwarna kuning emas merupakan lambang PPP lama, berasaskan Islam. Akan tetapi, partai ini tetap bersifat terbuka bagi siapa pun. PP didirikan dan dideklarasikan di Jakarta, 3 Januari 1999 dan 5 Januari 1999. Ketua Umum H. Jailani Naro dan Sekretaris Jenderal Drs. Mardinsyah.¹³⁸

Salah satu tujuan partai adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur materiil dan spritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diridhoi Allah SWT. Dalam bidang ekonomi, Partai Persatuan ingin meningkatkan dan mengembangkan sumber daya alam dalam rangka peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat.¹³⁹

17. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI)

PPNUI didirikan pada tanggal 5 Maret 2003 dengan asas Islam dengan Ketua Umum adalah KH. Syukron Ma'mun dan Sekretaris Jenderal adalah KH. Achmad Sjatari. Sebelumnya, partai ini merupakan metamorfosa dari Partai Nahdatul Ulama (PNU) yang gagal memenuhi *electoral treshold* dan hanya mendapatkan dan hanya mendapatkan 5 kursi di DPR RI pada Pemilu 1999. Ketika Pemilu 2004, PNU mengganti nama dan lambang apabila ingin berpartisipasi kembali, karena tidak memenuhi *electoral treshold*. Maka, PNU berganti nama menjadi PPNUI.

¹³⁸ Ibid

¹³⁹ Ibid

Kelahiran PPNU didasari juga atas dasar tidak sejalannya pemikiran sebagian kyai di kalangan NU dengan garis politik Abdurrahman Wahid (pendiri PKB). Nilai yang digunakan sebagai pijakan politik PPNU adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia dalam wadah NKRI yang adil dan makmur, sejahtera berkeadaban, demokratis, berkeadilan, maju dan mandiri di bawah ridho Allah dan maghfiroh Allah SWT.¹⁴⁰

18. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP merupakan partai yang berasaskan Islam peninggalan Orde Baru, partai yang dikenal dengan lambang ka'bah ini dipimpin oleh Hamza Haz yang pada Pilpres 2004 pernah maju sebagai salah satu kandidat presiden RI berpasangan dengan Agum Gumelar. Landasan partai ini adalah nilai *amar makruf nahi munkar*, nilai-nilai kebenaran, keadilan kejujuran dan keikhlasan akan dapat terwujud dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan nilai-nilai tersebut, terwujud pula manusia dan masyarakat yang saling menghargai dan menyayangi tanpa membedakan suku, ras, agama, kasta, warna kulit, bahasa dan sebagainya.¹⁴¹

Pada Pemilu 2009, PPP mendapat 37 kursi (6,61%) di DPR hasil Pemilu anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 5.533.214 suara (5,3%).¹⁴² PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali Pemilu, sejak tahun 1977 sampai pemilu

¹⁴⁰ Ibid

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² Zuly Qodir, op.cit., Hal 228

dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.¹⁴³ Begitu juga pada Pemilu 2014 sekarang, PPP masih tetap eksis dalam perpolitikan.

19. Partai Politik Islam Indonesia (PPII Masyumi)

Dilatarbelakangi pemikiran bahwa pelarangan partai Masyumi sudah dicabut dengan dianulirnya segala produk hukum pemerintah Orde Lama, dan sering dengan maraknya pendirian partai politik di masa reformasi, maka partai Masyumi sebagai kelanjutan dari yang pernah ada dahulu dihidupkan kembali. PPII Masyumi berasaskan Islam, didirikan di Yogyakarta, 8 November 1945 dan dihidupkan kembali di Jakarta, 28 Agustus 1998. Ketua Umum PPII Masyumi adalah Abdullāh Hehāmahūā M. Sē dan Sekretaris Jenderalya adalah Sayūti Rahawarin.¹⁴⁴

20. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

Secara historis, PSII berasal dari SDI yang didirikan di Solo tahun 1905. Setelah berfusi dalam PPP pada masa Orde Baru, kini PSII dimunculkan kembali oleh H. Taufiq R. Tjokroaminoto (keturunan HOS Tjokroaminoto yang merupakan salah satu pimpinan PSII tahun 1912). Walaupun saat ini muncul dua partai PSII, namun keduanya memiliki visi dan misi yang sama. Yang berbeda hanyalah dalam masalah prinsip saja. Asas PSII adalah *diemul Islam*. Didirikan dan dideklarasikan di Solo, 16 Oktober 1905 serta di Jakarta, 29 Mei 1998. Ketua

¹⁴³ Ibid

¹⁴⁴ Ridho Alhamdi, op.cit., Hal 105

Umum adalah H. Taufiq R. Tjokroaminoto dan Sekretaris Jenderal adalah Ir. H. Amaruddin Djajasubita.¹⁴⁵

Salah satu tujuan PSII adalah memelihara hubungan umat Islam dengan segala golongan sebangsa tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras dan warga negara Indonesia lainnya demi terwujudnya usaha kerja sama yang berfaedah bagi kesejahteraan umum. Program partai adalah program *thadhim*, yaitu program untuk melepaskan dari belenggu penjajahan supaya tidak terjajah kembali, lepas dari segala bentuk kekuasaan dan persatuan umat.¹⁴⁶

21. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII 1905)

Partai Sarekat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) pada dasarnya sama dengan PSII, asasnya sama-sama *dienul Islam*. Hanya saja, antara PSII dan PSII 1905 berbeda prinsip saja. PSII 1905 juga lahir dengan mengacu pada pendirian Syarikat Dagang Islam yang bertahun 1905. Pada masa Orde Baru, PSII kemudian berfusi dengan partai politik lain menjadi PPP karena tuntutan undang-undang dan menjadi organisasi kemasyarakatan. Setelah pemerintahan Soeharto turun, muncul dua kubu, yaitu PSII 1905 pimpinan Drs. H. Ohan Sudjana dan PSII pimpinan Taufiq R. Tjokroaminoto.

Seperti pada tahun 1905, partai ini tetap berlambang “Kalimat Tauhid” dalam gambar bulan sabit di bawahnya dan disertai tulisan PSII 1905. Didirikan dan dideklarasikan di Solo, 16 Oktober 1905/Jakarta, 21 Mei 1998. Ketua Umum

¹⁴⁵ Ibid

¹⁴⁶ Ibid

adalah Drs. H. Ohan Sudjana dan Sekretaris Jenderal adalah Ir. Paka Chairi. Partai ini bertujuan menjalankan Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Prioritas programnya adalah persatuan di dalam kalangan umat Islam, supaya tidak diadu domba dan tepecah-pecah. Wujudnya dengan konsolidasi ke dalam dan keluar. Konsolidasi keluar dengan mendorong demokratisasi dengan berbagai macam masukan-masukan ke DPR/MPR.¹⁴⁷

22. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)

Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) yang didukung oleh KPPNU. KPPNU merupakan Pengurus Besar NU “tandingan” dan menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi politik masyarakat, terutama warga NU pecahan Muktamar ke-19 tahun 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. H. Abu Hasan, MA yang merupakan pesaing utama KH. Abdurrahman Wahid dalam Muktamar tersebut merupakan ketua umum partai yang mengincar kelompok NU sebagai pendukungnya.¹⁴⁸

Partai SUNI berasaskan Pancasila. Didirikan dan dideklarasikan di Jakarta, 27 Juli 1998. Ketua Umum adalah H. Abu Hasan MA dan Sekretari Jenderal adalah Ali Fahmi. Tujuan partai SUNI adalah mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang adil dan makmur. Prioritas utamanya adalah peningkatan pada sektor primer, terutama perikanan dan pertanian, dengan koperasi sebagai ujung tombaknya.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ Ibid

23. Partai Umat Islam (PUI)

Partai Umat Islam (PUI) merupakan partai berasaskan Islam yang dideklarasikan di Jakarta, 26 Juli 1998 dengan Ketua Umum Deliar Noer dan Sekretaris Umum Fahmi Rahman. Pendirian PUI didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu segi ajaran dan historis. Dari segi ajaran adalah ajaran agama Islam yang tidak memisahkan antara kehidupan agama dalam arti sempit dengan kehidupan bermasyarakat seperti politik, ekonomi dan sosial. Dari segi historis, umat Islam di Indonesia merupakan pelopor dalam mendirikan partai-partai politik. Kalau Budi Oetomo masih bersifat nasionalisme Jawa, maka kehadiran Partai Serikat Islam pada tahun 1912 tujuannya antara lain adalah nasionalisme di Indonesia.¹⁵⁰

PUI sama sekali tidak bermaksud membentuk negara Islam. Partai ini memandang pengalaman membuktikan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW yang bisa berdampingan dengan umat bangsa lain secara damai dengan menggunakan hukum masing-masing, yaitu Konstitusi Madinah. Partai yang didirikan oleh kalangan berlatar belakang dosen ini memiliki program utama pembangunan dan pembinaan moral dari setiap aspek kehidupan bernegara dengan landasan moral Islam.¹⁵¹

¹⁵⁰ Ibid

¹⁵¹ Ibid

24. Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI)

Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI) memiliki ideologi pancasila, didirikan pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai reaksi dari reformasi. Partai ini melihat bahwa selama ini di Indonesia telah terjadi erosi keteladanan kepemimpinan dan krisis moral. Karena itu, dibutuhkan kehadiran sebuah partai politik yang menekankan pada agama Islam dan aqidah Islam.¹⁵²

Partai yang kental dengan nuansa Islam dan terbuka bagi agama lain ini, memiliki program dalam bidang agama yaitu menciptakan kerukunan umat beragama dan meningkatkan iman dan takwa masyarakat. Di bidang ekonomi, PUMI berupaya memperjuangkan ekonomi yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam bidang politik, partai ini memperjuangkan agar kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Sementara dalam bidang ideologi, PUMI memiliki program memperjuangkan agar pancasila tetap menjadi ideologi negara. Ketuanya adalah H. Anwar Junus SH dan Sekretaris Jenderal adalah KH. Abdillah Muhammad. Partai ini mengikuti Pemilu 1999, akan tetapi karena prolehan suaranya kecil, pada tahun 2002 partai ini berfusi dengan beberapa partai Islam lainnya menjadi PBR.¹⁵³

¹⁵² Ibid

¹⁵³ Ibid